

**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga
Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syaria'h dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FIDYASTUTI
10300112064

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fidyastuti
Tempat/tgl.Lahir : Jayapura, 16 Desember 1994
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Prumnas Antang blok 1 No 119 Makassar
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di
Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam
Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, literature, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh dikarenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Agustus 2016
Penyusun,

FIDYASTUTI
10300112064

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam" yang disusun oleh Fidyastuti, NIM: 10300112064, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2016, bertepatan dengan 28 zulkaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syaria'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 31 Agustus 2016
28 zulkaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Nila Sastrawati, M. Si	(.....)
Munaqisy II	: Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Dudung Abdullah, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hamzah Hasan, M. Hi	(.....)

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam, barokah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu *Dinul Islam*.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Islam Universitas Alauddin Makassar dan sebagai wujud serta partisipasi dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama di bangku kuliah.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala hormat diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Hamid Dhariza dan Ibunda Sitti Jastia (almarhum) tercinta yang tanpa lelah selalu memberikan nasehat dan kasih sayangnya serta memberika dukungan secara moral dan finansial selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kakak tersayang Abdul Hajad Wahyu dan adik-adik tercinta Wardani dan Yusri Ibnu Padar yang senantiasa memberi supportnya.

3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M. Si dan Ibu Dr. Kurniati, M. Hi. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Bapak Dr. Dudung Abdullah, M.Ag dan Bapak Dr. Hamsah Hasan, M.Hi_selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si dan Bapak Abd. Rahman Kanang, M.Pd., P.hD, selaku Penguji I dan Penguji II, terima kasih banyak atas segala saran dan bimbingannya yang diberikan kepada penulis.
7. Kakak Syamsi Machmoed (Kak Canci) selaku Pegawai Jurusan yang telah banyak membantu dalam pengurusan surat-surat dalam sistem penyelesaian skripsi.
8. Segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bersedia memberikan pelayanan dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Univerrsitat Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, atas segala ilmu teladan yang diberikan selama menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Alauddin Makassar, yaitu Wardia, Unha, Sadli, Fuji, Ayu, Angga, Ahsan, Sukma dan teman-teman seperjuangan lainnya, Kakak senior Angkatan 2011 Andi Wira Saputra, Adik-adik Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan 2013, 2014, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama ± empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.

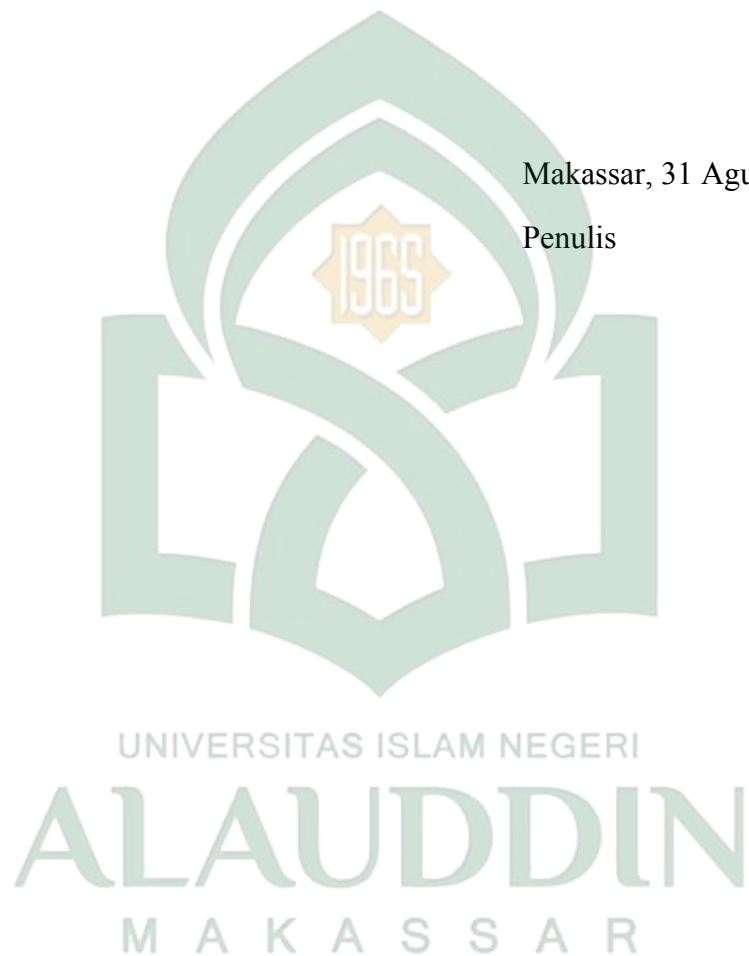
11. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Rafni Trikoriaty Irianta, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bapak Mulyadi S.H, Ibu Yohani Widayati, A. Annisya, dan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan, Terimah kasih atas bantuan dan kerjasama selama penulis melakukan penelitian.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penuh harapan, semoga dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga apa yang telah dikerjakan bernilai ibadah yang berkelanjutan disisi Allah swt. Amin.

Makassar, 31 Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12- 58
A. Narapidana Wanita	12
B. Tujuan Hukuman Dalam Sistem Pemidanaan Islam dan Pemidanaan secara umum	16
C. Pengertian Wanita	27
D. Pembinaan Narapidana	37
E. Lembaga Pemasyarakatan	45
F. Perspektif Hukum Islam	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	59-62
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Data	60
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Instrumen Penelitian	61
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	61
G. Pengujian Keabsahan Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63-78
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang.....	69
C. Pembinaan Narapidana Wanita Menurut Hukum Islam.....	74
D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana Wanita Kelas IIA Sungguminasa	76
 BAB V PENUTUP	 79-80
A. Kesimpulan.....	79
B. Implikasi Penelitian.....	80
 DAFTAR PUSTAKA	 81-82



ABSTRAK

Nama : Fidyastuti
Nim : 10300112064
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1). Bagaimana sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas wanita sungguminasa menurut undang - undang?, 2). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang narapidana ?, 3). Bagaimana kendala yang di hadapai dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas wanita sungguminasa ?

Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam Lapas. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Lapas Wanita kelas IIA sungguminasa untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung Kepala Kasie Binadik, Kasubsi Bimaswat, dan Narapidana narkotika 1 orang.

Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa, mayoritas penghuni Lapas Wanita kelas IIA Sungguminasa adalah kasus narkotika sebanyak 121 orang, pembunuhan 12 orang, pencurian 16 orang, penggelapan 14 orang, penipuan 16 orang, tipikor 4 orang, perlindungan anak 3 orang, pemalsuan surat-surat 2 orang, trafficking 1 orang. Sedangkan sistem pembinaan narapidana meliputi keterampilan berupa keahlian seperti menjahit, bertani, tata boga, salon dan kerajinan tangan, Adapun kegiatan atau aktifitas keseharian narapidana wanita secara positif agar setelah mereka bebas dapat bermanfaat di masyarakat dan tidak dipandang sebelah mata sebagai orang yang telah melakukan kejahatan atau kriminal. Pembinaan narapidana menurut hukum Islam dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA dilaksanakan dengan tertib bagi yang beragama Islam melakukan jum'at ibadah berisi kegiatan ceramah dan shalat berjamaah oleh Ustadzah dan melakukan program hafal asmaul husna. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sistem pembinaan yaitu kendala teknis seperti kurangnya kelengkapan yang menunjang fasilitas kerja kantor dan narapidana seperti peralatan komputer, alat pengamanan, alat kesehatan. Serta kurangnya jumlah petugas serta pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Gowa. Serta kurangnya perhatian pemerintah untuk memberikan jaminan kepada calon mitra untuk mengambil peran dalam pembekalan keterampilan bagi Narapidana, agar kelak menjadi modal menciptakan lapangan kerja sendiri setelah selesai menjalani pembedaannya.

Berdasarkan hasil Penelitian diatas bahwa sistem pembinaan telah memenuhi aturan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang berlaku sesuai undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adapun bentuk kekurangan fasilitas kerja berupa peralatan komputer, alat pengamanan, alat kesehatan dan masih kurangnya personil pengamanan pada Lapas wanita kelas IIA Sungguminasa, kiranya dapat dipertimbangkan untuk penambahan personil.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ﺙ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ﺡ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	x	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dani
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوْحَةُ : *raudah al- atfal*

القَاصِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَم : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Al-Qur’an* (dari *Al-Qur’an*), *al-hamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِذْنِ اللَّهِ *diinullah* بِبِلَاءِ اللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummam Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
H	= Halaman
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Lembaga – Bollangi Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yang menempati lahan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dengan Luas Bangunan secara keseluruhan $\pm 14.000 \text{ M}^2$.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa mulai dibangun pada Tahun 2004 dan mulai dioperasikan sejak 5 September 2007 serta diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 oleh Bapak Patrialis Akbar, S.H., Menteri Hukum dan HAM R.I.¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan Khusus Wanita yang berfungsi untuk melakukan Pembinaan dan Perawatan Khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Wanita mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Pembinaan/ Anak Didik Wanita.
2. Memberikan bimbingan sosial/ kerohanian pada Narapidana / Anak Didik Wanita.

¹LapasWanitaSungguminasa“Profil”, *Website Resmi*. Lapaswanitasungguminasa.blogspot.co.id/p/profil_22.html?m=1 (14 Mei 2016).

3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
4. Melakukan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga²

Sementara itu Sistem pemidanaan pemsyarakatan secara umum dilaksanakan berdasarkan beberapa asas diantaranya yaitu: Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:

1. Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga binaan pemsyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemsyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemsyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemsyarakatan tanpa membedakan orang.
3. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan Pemsyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

²LapasWanitaSungguminasa“Profil”, *Website Resmi*. Lapaswanitasungguminasa.blogspot.co.id/p/profil_22.html?m=1 (14 Mei 2016).

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (warga binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi).
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan

- a. Secara intramanual (di dalam LAPAS)
- b. Secara ekstramanual (di luar LAPAS)

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan permasyarakatan yang telah memenuhi

persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.³ Namun yang jadi pokok pembicaraan adalah apakah pembinaan terhadap narapidana terkhusus wanita tidak bertentangan norma-norma Islam?, Terjadi banyak kekhawatiran ketika kegiatan yang diberikan terhadap narapidana wanita tidak sejalan hak-hak yang telah diatur dalam Islam.

Selain itu, Islam menjelaskan tentang kedudukan wanita bahwa Dalam Islam, wanita bukanlah musuh atau lawan kaum laki-laki. Sebaliknya wanita adalah bagian dari laki-laki demikian pula laki-laki adalah bagian dari wanita, keduanya bersifat saling melengkapi. Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan hak wanita atau penzaliman wanita demi kepentingan laki-laki karena Islam adalah syariat yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ada beberapa pemikiran keliru tentang wanita yang menyelusuk ke dalam benak sekelompok umat Islam sehingga mereka senantiasa memiliki persepsi negatif terhadap watak dan peran wanita.

Manusia sejak lahir membawa atribut biologis yang berbeda, dan sejak itupula dibuatkan identitas gender oleh lingkungannya, lewat proses sosialisasi dan kulturasi, muncul pandangan gender dan dijadikan landasan berfikir dan falsafah hidup sehingga menjelma menjadi ideology gender yang membedakan dua jenis manusia berdasarkan kepantasannya.

Pandangan gender bahwa, perempuan itu harus lemah lembut irasional, berkorban, pengasuh, tidak mampu memimpin dan orientasinya sirkular, sementara laki-laki harus kuat, rasional, agresif, harus memimpin dan berorientasi linier progresif.⁴

³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2008), h. 108.

⁴A Markarma, "Bias Gender Dalam Penafsiran Al-qur'an", Tesis (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2003), h. 24.

Dapat disimpulkan bahwa orang-orang Arab memiliki keyakinan pada zaman Jahiliyah bahwa perempuan hanya memiliki tiga kedudukan, yaitu:⁵

1. Perempuan dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki dan diwariskan tetapi tidak mewarisi.
2. Perempuan berada dibawah kekuasaan dan perwalian laki-laki, tidak punya kebebasan dan kehendak.
3. Perempuan dikubur hidup-hidup.

Sejak Islam datang kedudukan perempuan diangkat kemudian segala kezaliman dan kesewenang-wenangan dihapuskan kemudian menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki punya kedudukan yang sama sebab keduanya makhluk yang berasal dari suatu diri. Allah swt. Berfirman dalam QS An-nisa/ 4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁶

Kemudian, Islam meberikan hak-hak konstitusional, sipil dan kemanusiaan kepada perempuan. Islam menggambarkan perempuan dan laki-laki dengan

⁵Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, h. 9.

⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 77.

kedudukan yang sama melalui perintah Allah swt. kepada Adam juga ditujukan kepada Hawa.

Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS Al- Baqarah/ 2: 35

وَقُلْنَا يٰٓآدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.⁷

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dari latar belakang yang dibahas sebelumnya maka tercapailah fokus penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita
2. Perspektif hukum Islam

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran pembaca terhadap variable-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam pointer-pointer fokus tersebut, maka fokus penelitian tersebut terdahulu dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:

Adapun yang deskripsi fokusnya adalah

1. Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.⁸

⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 6.

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, BAB I, Pasal I Ayat VII.

2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.⁹
3. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau wanita memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan sang suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, pria dan wanita sama-sama berkewajiban mengasuh anak hingga usia dewasa. Jika ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan memasak untuk suami maka itu adalah konstruksi peran perempuan karena laki-laki juga bisa melakukan hal itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih kuat, tegas dan perempuan lemah lembut ini yang kemudian disebut dengan gender.¹⁰

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>. Diakses pada tanggal 03 April 2016. Jam 19.22. WIB.

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>. Diakses pada tanggal 03 April 2016. Jam 20.30. WIB.

4. Penjara atau Lembaga adalah wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 M.¹¹
5. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹²

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, dapat menimbulkan pokok masalah yaitu bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS Kab. Gowa Dalam perspektif hukum Islam. Setelah itu timbullah sub-sub masalah antara lain:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lapas wanita Sungguminasa menurut Undang-undang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pembinaan narapidana ?
3. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan narapidana wanita di lapas wanita Sungguminasa ?

D. Kajian Pustaka

Untuk draft yang berjudul “Pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Kab. Gowa dalam perspektif hukum Islam”, dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku yang dengan pembahasan yang relevan dengan

¹¹P. A. F. Lumintang, *Hukum Panintesisir Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), h. 56.

¹²Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 307.

penelitian ini dan sesuai dengan teori-teori yang dikategorikan perlu untuk memperkuat wacana dominan dalam skripsi ini. Adapun buku-buku tersebut adalah:

1. *Musdah Mulya*, dalam bukunya *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Buku ini memuat pesan yang tegas bahwa semua pandangan bias gender, bias nilai-nilai budaya patriarkal dan bernuansa feodal harus segera di hapus dan dihilangkan demi membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih demokratis dan lebih beradab. Buku ini juga menjelaskan pentingnya interpretasi Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, interpretasi yang sejuk, memihak dan ramah terhadap perempuan.¹³ Buku ini tidak menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam kaitanya yang sedang menjalani penahanan di lembaga pemasyarakatan, yang sering juga disebut sebagai narapidana wanita.
2. *Sulistiyowati Irianto* dalam bukunya *Perempuan di Persidangan*. Buku ini menguraikan secara ringkas tentang perempuan yang menjadi pelaku ataupun korban kejahatan dalam pandangan hukum yaitu; pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan dalam persidangan memiliki beberapa motif, perempuan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi berdasarkan hukum pidana dan hukum tambahan dari masyarakat atau oknum penegak hukum, perempuan pelaku kejahatan sama halnya seperti perempuan korban berada dalam posisi tawar yang lemah, perempuan sering kali bersifat pasrah karena tidak mengerti dengan proses persidangan, perempuan merupakan oknum yang bertanggung jawab penuh terhadap kasus pembunuhan dan pembuangan bayi, masyarakat dan aparat penegak hukum sering mengaitkan antara kejahatan dan riwayat

¹³Musdah Mulya, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Megawati Institute: CV. Bisma Optima, 2014), h. 64.

seksual yang dilakukan oleh perempuan.¹⁴ Buku ini tidak menjelaskan tentang pembinaan perempuan yang telah ditetapkan sebagai terdakwa.

3. *Ikhwan Fauzi*, dalam bukunya *Perempuan dan Kekuasaan*. Buku ini menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang menempati kedudukan yang penting, hal ini disebabkan karena perempuan membawa persamaan antara laki-laki dan perempuan, selain itu buku ini juga menjelaskan persamaan laki-laki dan perempuan dalam ranah politik.¹⁵ Buku ini tidak menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam Islam yang kaitannya dengan pelaku kejahatan.
4. *Dwidja Priyatno*, dalam bukunya *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Buku ini menjelaskan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan hak-hak kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua aturan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.¹⁶ Buku ini tidak menjelaskan tentang aturan-aturan yang wajib ditaati bagi narapidana wanita.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui narapidana wanita dilembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui sistem pembinaan yang diberikan kepada narapidana wanita di lapas wanita Sungguminasa Kab. Gowa.

¹⁴Sulistiyowati Irianto dan L. I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 132.

¹⁵Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, h. 9.

¹⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, h. 108.

Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

a. Secara Teoritis

Media pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/ mahasiswi yang berminat mengkaji problematika pembinaan narapidana wanita di Kabupaten Gowa.

b. Secara Praktis

Rekomendasi wacana bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan pembinaan narapidana wanita.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Narapidana Wanita*

1. Pengertian Pidana

Kata pidana dalam Hukum Islam disepadankan dengan *jinayat* (*Jarimah*). Dalam syariat Islam, hukum *jinayah* (pidana) adalah mencakup segala pelanggaran yang dijatuhi hukuman berupa *qishash* (yang hukumannya dapat ditentukan oleh korban yang bersangkutan) dan *hadd* (yang hukumannya telah ditentukan sendiri oleh Allah swt), atau *ta'zir* (yang hukumannya berdasarkan pertimbangan ijtihad qadhi atau pemerintahan).¹

Pengertian yang dimaksud di atas adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Dalam syari'at Islam *jinayat* bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus dihindari. Oleh karena ia akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Dalam pandangan al-Jurjani, ia akan mengartikan dengan segala perbuatan yang berbahaya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.²

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, tampak mengandung makna yang sangat luas, oleh karena mencakup seluruh macam perbuatan yang membawa dampak negative. Sehingga boleh jadi semua macam pelanggaran masuk dalam kategori perbuatan pidana, meskipun pelanggaran termasuk kecil atau biasa. Lain halnya pengertian yang diberikan oleh Tim Penyusun Ensiklopedia Islam, menurut mereka *jinayat* berarti tindak kejahatan atau

¹Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam), h. 193.

²Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 79.

pelanggaran yang dilakukan oleh *Syara'*, baik yang bertalian dengan nyawa, anggota tubuh, kehormatan dan harta benda/kekayaan seseorang maupun ketentraman masyarakat yang menyebabkan si pelakunya harus mendapat hukuman sebagai ganjaran dari perbuatannya sebagaimana yang ditentukan oleh *Syara'* sendiri.³

Dari keterangan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap *Jinayat* itu harus memiliki rukun-rukun umum yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Nash* yang melanggar perbuatan atau mengancam hukum terhadapnya dan unsur ini biasa disebut 'unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyawa atau sikap tidak berbuat, dan ini biasa disebut "unsur materil" (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).⁴

Keterangan di atas memberikan indikasi bahwa untuk suatu perbuatan dianggap pidana adalah terpenuhinya ketiga unsur yang telah disebutkan. Dengan demikian jika ketiga unsur yang tersebut tidak ada dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tidak dianggap suatu pidana.

2. Sistem pemidanaan di Indonesia

a. Sistem Pemidanaan Menurut KUHP

Bagian terpenting dari KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari

³Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 80.

⁴Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 6.

hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.

Menurut pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu.

Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan, yaitu:

- a. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.
- b. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika Hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, Hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperative, sebagaimana Hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.

Dalam penerapan perumusannya dalam tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sistem alternative, dalam arti bila suatu tindak pidana, Hakim hanya boleh memilih salah satu saja.

Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan diantara pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Di sini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis

pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.

Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah:

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN)

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim⁵

⁵Ninie suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 20.

B. Tujuan Hukuman dalam sistem Pidanaan Islam dan Pidanaan secara Umum

1. Pidanaan Islam

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman atau pidana dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* berasal dari kata: (عَقَبَ) yang sinonimnya (بعقبه وجاء خلفه), artinya *mengiringinya dan datang di belakangnya*. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya (فعل بما سواء جزاه), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman manakala ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bias menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁶

Di dalam Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan *ta'zir*. Menurut Dr. Musthafa al-Rafi'i, *ta'zir* adalah hukuman yang ukurannya tidak dijelaskan oleh nash syara' dan untuk menentukannya diberikan pada waliy al-amri dan qadli. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjaraan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam *ta'zir*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian golongan Hanbali dan yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136.

Pemasyarakatan tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat.⁷

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat* baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi *ta'zir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat*.⁸

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dijatuhkannya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari

⁷ Asshidiqie, Jimly, 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Penerbit Aksara), h. 82.

⁸ Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 143.

kemaksiatan, serta merangsang berlaku taat. Ketika tujuan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib berdiri di atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut:

Pertama, hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya.

Kedua, batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat. Demikian juga bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan. Dalam hal ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.

Ketiga, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa (tindak pidana). Hukuman disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya.⁹

Dalam hukum pidana Islam ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam Surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 255.

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah;

Pertama pidana dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal *hukum qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, dan di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.

Kedua; pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinahan.

Ketiga; pemidanaan dimaksudkan sebagai *sepeziale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi.¹¹

Pedoman pemidanaan (*strafvoetsing-leiddraad*), tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu negara. Sebab bagaimanapun juga pedoman pemidanaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang dianut.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1971), h. 165.

¹¹Makhrus Munajat, *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001), h. 66.

2. Pidana Secara Umum

Didalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak manusia.

1. Aliran Klasik, aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).

Aliran ini berpijak pada tiga tiang:

- a) Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b) Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c) Asas Pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹²

2. Aliran Modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif kerana dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi kejahatan secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau *daderstrafrecht*.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi

¹²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama, 2009), h. 31.

harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, factor-faktor biologis atau lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan “*doktrin kebebasan kehendak*”.¹³

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a) Menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*).
- b) Pidana harus sesuai dengan tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*).
- c) Doktrin determinisme (*doctrine of determinisme*).
- d) Penghapusan pidana mati (*abolition of the death penalty*).
- e) Riset empiris (*Empirical Research: Use of the inductive method*).
- f) Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*).

3. Aliran Neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan sarjana Inggris menyatakan bahwa konsep keadilan social berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada *daad-daderstrafrecht*.¹⁴

Adapun ciri-ciri aliran ini adalah:

- a) Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain.
- b) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
- c) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan

¹³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h. 34.

¹⁴Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h. 35.

lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.

- d) Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusannya tidak kita jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP kita sendiri. Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*) yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas. Pedoman ini sangat berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional.

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam pasal 52, terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana.
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana.
- 4) Apakah tindak pidana dilalukan secara berencana.
- 5) Cara melakukan tindak pidana.
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- 7) Riwayat hidup dan keadaan social-ekonomi pembuat tindak pidana.
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.
- 11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

¹⁵Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h. 39.

Untuk sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 dan UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP (selanjutnya disebut Prp), UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Meskipun *Wetboek van Strarecht* peninggalan zaman penjajahan Belanda sudah tidak dipakai lagi di Negara kita, tapi sistem pemidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari zaman W. V. S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok diancam secara alternative pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan pidana pokok, kecuali dala pasal 39 ayat (3) (perampasan atas barang sitaan dari

orang yang bersalah) dan pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh tahun, yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana 39 diatur dalam Pasal 12 ayat (3) sedangkan minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu hari dan paling lama lima belas hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan atau karena ketentuan Pasal 52-52a. adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 KUHP.

a. Proses pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Mentri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang jatuh pidana ke dalam Masyarakat.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak Narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu:

1. Tahap Pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.
2. Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *sepertiga* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.
3. Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *setengah* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.
4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung *dua per tiga* dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

b. Identifikasi sarana dan prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan “angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalaupun berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan . berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian dari mereka relative belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat

menyentuh perasaan para Narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.¹⁶

C. Pengertian Wanita

Islam memberikan kedudukan dan kehormatan yang tinggi kepada wanita, baik dari segi hukum ataupun dari masyarakat sendiri. Pada kenyataannya, apabila kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, maka persoalannya akan lain. Sebab, struktur, adat, kebiasaan, dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan kepada wanita.¹⁷

Catatan sejarah mengatakan bahwa ajaran Islam telah mengangkat derajat wanita sama dengan laki-laki dalam bentuk hukum, yakni dengan memberikan hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai ahli waris orang tua atau keluarga dekatnya. Hukum Islam juga memberikan hak kepada mereka untuk memiliki sesuatu (harta) atas namanya sendiri.¹⁸

Apabila saya melihat situasi perempuan Indonesia pada saat ini tidak dapat dihindari munculnya keraguan dalam diri saya akan kesiapan perempuan Indonesia untuk menghadapi abad perempuan itu. Untuk mampu berperan dan menggunakan seoptimal mungkin kesempatan yang tersedia pada abad ke-21 perempuan dituntut untuk memiliki suatu sifat mandiri, disamping suatu kebebasan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

Persyaratan ini terasa belum dimiliki oleh perempuan Indonesia. Profil perempuan Indonesia pada saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut

¹⁶Hmibecak.blogspot.co.id diakses pada tanggal 28 juni 2016. Jam 22.55 WIB.

¹⁷Atiqah hamid, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: DIVA pers, 2016), h. 13.

¹⁸Atiqah hamid, *Fikih Perempuan*, h. 14.

untuk berperan dalam semua sektor, tetapi di sisi lain muncul pula tuntutan lain agar perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai perempuan. Contoh situasi yang dilematis yang dihadapi oleh para perempuan Indonesia dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarir.

Di satu sisi perempuan karir merasa terpanggil untuk mendharmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara mereka, di sisi lain mereka dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat yang melihat bahwa perempuan karir/ibu karir sebagai salah satu sumber ketidakberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Yang sangat memprihatinkan adalah adanya opini di kalangan masyarakat yang melihat perempuan karir adalah “pengganggu suami orang lain”. Masih banyak contoh-contoh lain yang mencerminkan situasi dilematis yang dihadapi oleh perempuan Indonesia yang apabila tidak dihilangkan akan membuat perempuan Indonesia tidak akan mampu mengembangkan diri mereka dan berkarya secara otonom bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.¹⁹

1. Hakikat dan Kodrat Perempuan

Untuk mengenal perempuan secara mendalam, terhadap istilah-istilah atau simbol-simbol yang digunakan oleh al-Qur'an dalam mengungkapkan jenis kelamin sebagaimana halnya laki-laki. Istilah-istilah yang disimbolkan sebagai perempuan, yang digunakan oleh al-Qur'an, antara lain:

a) *Al-Nisa'*

Kata *an-nisa'* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *mar'ah*, yang berarti perempuan, juga ada yang mengatakan berasal dari kata *nasa-yunsu*, berarti meninggalkan. Dalam kitab lisan *al-'Arab*, kata tersebut berasal dari kata *nasa'a*, yang berarti tertunda. Makna ini dapat dilihat pada ungkapan orang Arab

¹⁹Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, Dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: kanisius, 1997), h. 61.

perempuan tertunda haidnya karena masa mulai hamil.²⁰ Perempuan memiliki kodrat, yang berbeda dengan laki-laki, yaitu masa-masa tertentu memasuki usia balig mengalami haid. Hal itu dapat dipahami karena kata tersebut disandingkan dengan kata *al-rijal*, yang berarti laki-laki yang telah balig/matang.

Untuk memahami kodrat dan hakikat perempuan terlebih dahulu dikemukakan asal-usul kejadiannya. Perempuan termasuk laki-laki sebagai makhluk hidup sebagaimana makhluk hidup lainnya diciptakan oleh Allah swt. Penciptaan manusia berasal dari tanah, antara lain:

b) QS al-Saffat/37:11

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.²¹

Penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama yang kemudian mengesankan pemahaman negative terhadap perempuan, yang dipandang derajatnya lebih rendah dari pada laki-laki. Perempuan dipandang sebagai salah satu faktor, selain harta dan tahta yang mengancam keberadaan kaum laki-laki, yang harus diwaspadai dalam kehidupan manusia. Di samping itu, terdapat pula syair Arab dengan pandangan yang menyindir, terkesan merendahkan derajat perempuan, yaitu "perempuan adalah setan yang diciptakan untuk laki-laki: kami berlindung kepada Allah dari seburuk-buruk setan yang menggoda". Pemahaman yang keliru ini merupakan sebuah konstruksi budaya. Kehidupan perempuan pra-Islam dalam pemahaman yang keliru ditegaskan oleh al-Qur'an pada surah al-

²⁰ Abd Rahman R, *Perempuan Antara Idealis Dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 1.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 635.

Nahl/16, ayat 58-59. Makna yang dapat dipahami bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk, bukan daging atau tulang lainnya, karena tulang rusuk itu mempunyai fungsi yang besar, melindungi organ tubuh yang vital, jantung, hati, limpa, termasuk rahim seorang perempuan yang hamil agar janinnya terjaga dari benturan benda keras. Dalam kaitan ini, sejalan dengan fungsi seorang ibu adalah orang pertama menjadi pelindung bagi anak-anaknya, menyusui, mendidik dan menyiapkan keperluannya.

Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan potensi yang sama, QS al-Syams/91:8. Dengan potensi itu dan kemampuan yang cukup diberikan kepadanya sehingga dapat memikul tanggung jawab. Kedua jenis kelamin itu dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Salah satu kodrat perempuan sebagai makhluk hidup adalah berkembang baik yang biasa disebut reproduksi. Hal itu dijelaskan oleh beberapa ayat, antara lain:

a) QS al-Insan/76:2

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.²²

Ayat di atas menjelaskan tentang proses kejadian manusia secara biologis, sebagaimana point pertama memberi isyarat bahwa perempuan diciptakan oleh Allah dengan melengkapi rahim sebagai alat reproduksi, sebagai tempat pertemuan sperma dengan ovum. Hal itu mengalami proses menjadi segumpal darah yang selanjutnya menjadi segumpal daging. Daging itu menjadi tulang

²²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 856.

belulang yang kemudian tulang belulang itu dibungkus oleh daging lalu kemudian berbentuk manusia.

Keberadaan perempuan sebuah kehormatan baginya, karena dari perutnyalah lahir para Nabi, orang-orang saleh dan para wali sebagai pembawa risalah dan pelanjut ajaran Tuhan dari generasi ke generasi.

Kelemahan fisik bagi perempuan tidak akan mengurangi derajatnya untuk meraih posisi dan jabatan penting, seperti kaum lelaki. Kaum lelaki sebagai pemimpin rumah tangga bukanlah sebagai derajat kemuliaan, melainkan sebagai tanggung jawab dan tugas secara fungsional sebagai kepala keluarga.

Derajat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan tidak ditentukan oleh status dan jabatannya atau pekerjaannya, tetapi bagaimana dia menjalankan amanah dan memberikan pelayanan yang membawa manfaat bagi orang lain. Perempuan menerima hukuman yang sama dengan laki-laki atas kegagalan dalam menjalankan kewajiban mereka dan pahala yang sama atas pelaksanaan perintah Tuhan dan perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana firman Allah: “sungguh aku tidak menyianyiakan amal orang yang berbuat, baik pria maupun perempuan”.

Dengan demikian, perempuan seperti halnya kaum lelaki dapat menikmati status yang sama dan melakukan fungsi yang sama. Misalnya, keduanya dapat menjadi guru, dai, keduanya dapat membeli dan menjual harta miliknya, dan semacamnya. Perempuan memungkinkan dirinya untuk memainkan sejumlah peranan selama hidupnya. Peran-peran perempuan dapat ditempatkan dengan baik dalam tiga kategori.

1. Peran yang ia mainkan sebagai umat manusia.
2. Peran yang dimainkan sebagai anggota keluarga.
3. Peran sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, perempuan seperti halnya kaum laki-laki terbuka peluang yang sama untuk berperan dan mensejajarkan diri dalam berbagai profesi untuk berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan.²³

a. Hak konstitusional perempuan

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahwa memperjauh perbedaan tersebut, agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan *“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah Perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

²³ Abd Rahman R, *Perempuan Antara Idealis Dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, h. 1-21.

mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Cedaw).

Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan gender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan HAM dalam Millenium Development Goals (MDGs). Hal ini diwujudkan dalam delapan area upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah: mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan keberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70 persen penduduk miskin dunia adalah perempuan.

Pada tingkat nasional upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan gender telah dilakukan walaupun pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perhatian serius. Cedaw telah diratifikasi sejak 1984 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan gender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip-prinsip umum, maupun dengan menentukan kuota tertentu. Bahkan, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, telah dibentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga²⁴

b. Kesetaraan perempuan dan Laki-laki

Jika semua perempuan dan laki-laki memiliki kualitas keilmuan, keterampilan dan juga yang tak kalah pentingnya, kualitas spiritual (keimanan),

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 564.

maka gambaran masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur akan lebih cepat terwujud. Sebaliknya, berbagai kebobrokan dan kehancuran masyarakat, seperti yang kita sering saksikan melalui media televisi, mungkin tidak akan sefatal itu.

Akan tetapi, data-data resmi dari berbagai lembaga internasional, seperti UNDP, UNFPA, UNICEF menyebutkan secara jelas betapa banyaknya perempuan, khususnya di negara-negara berkembang, terlebih lagi di negara-negara miskin yang diliputi perang dan konflik, masih mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi berbasis gender. Di antaranya perempuan masih menjadi korban incest, perkosaan, kawin paksa dengan orang tidak disukai, dipoligami, dipaksa menikah ketika anak-anak, pelecehan seksual, dihitan secara mengerikan, dibunuh untuk menjadi tumbal kehormatan keluarga (*honor killing*). Tidak sedikit perempuan meninggal ketika melahirkan karena tidak terpenuhi hak-hak dasarnya paling mendasar dan juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan (terutama kesehatan reproduksi). Tidak sedikit perempuan terpuruk dan menderita karena ketiadaan akses pada pendidikan. Bahkan sejumlah perempuan diperdagangkan (*trafficking*) untuk dijadikan budak seks, pelacur dan pekerja paksa.

Perempuan juga dijadikan obyek media, bintang iklan dengan penampilan hampir telanjang, dipaksa untuk tampil cantik, ramping, kurus tinggi dan putih yang kesemuanya itu sering kali harus dilakukan dengan cara-cara rekayasa yang membahayakan kesehatan tubuh dan hidup perempuan.

Dan terakhir tapi tidak kurang krusialnya adalah perempuan juga mengalami upaya-upaya pemiskinan secara struktural. Mereka dibatasi aksesnya dalam banyak bidang kehidupan terkait peningkatan ekonomi. Tidak heran jika data statistik menyebutkan lebih banyak perempuan yang miskin. Bahkan, kemiskinan itu sendiri berwajah perempuan.

Gambaran memprihatinkan di atas itulah yang disebut dengan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Semua itu akibat ulah manusia (perempuan dan laki-laki), baik sengaja maupun tidak disengaja.

Dalam Islam diajarkan bahwa perempuan adalah penerus generasi manusia, tanpa perempuan tidak mungkin terjadi proses reproduksi manusia. Dengan rahim perempuan yang sengaja diciptakan Tuhan Maha Kuasa, perempuan memiliki fungsi-fungsi reproduksi: haid, hamil, melahirkan dan menyusui.

Akan tetapi eksistensi perempuan yang penting dan sentral itu belum sepenuhnya disadari, termasuk oleh perempuan sendiri. Disinilah pentingnya kita menggali ajaran Islam, demi menggugah kesadaran umat Islam, terutama para perempuan agar tampil berbenah diri, menyadari hakikat kemanusiaannya yang sejati sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban, baik warga Negara, sebagai anggota masyarakat, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan dan seterusnya.

Agar perempuan dapat mengerti, memahami dan menuntut hak-haknya yang asasi dan selanjutnya mampu menunaikan kewajiban asasinya secara optimal, perempuan harus belajar dan belajar demi mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya, baik potensi kognitif, afektif dan psikomotorik, bahkan juga potensi kenabian (spiritual) agar dapat menjalankan tugas utama sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.

Islam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesetaraan dan kesetua manusia.²⁵

²⁵Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Megawati Institute: CV. Bisma Optima, 2014), h. 28.

c. Posisi perempuan sebagai warga masyarakat

Posisi perempuan dalam masyarakat dan negara sangat jelas, yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki.

Perintah Allah untuk berbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam ranah domestic maupun ranah public sangat tegas dan tandas. Keadilan mesti ditegakkan. Demikianlah, keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang sangat mendasar dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai dan perilaku umat di manapun dan kapanpun. Keadilan yang diajarkan Islam selalu memuat prinsip membela yang benar, melindungi yang tertindas, menolong yang kesulitan, dan menghentikan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dengan keadilan, yang benar akan dibela meskipun merupakan kelompok minoritas dan tertindas.

Keadilan Islam dengan nilai-nilai keadilan telah membuat kaum tertindas dan marjinal (*mustadh'afin*) memiliki harapan. Di antara kelompok *mustadh'afin* yang paling beruntung dengan keadilan Islam adalah kaum perempuan. Posisi perempuan sebagai warga masyarakat dan warga negara adalah setara dengan laki-laki. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, keduanya pun bertanggung jawab penuh membentuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (*baladatul thayyibah wa rabbun ghafur*).

Perempuan harus selalu ingat bahwa tugas umatnya diciptakan Allah swt adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, pengelola dan menejer. Tugas itu dimulai dari memimpin, mengelola dan menata diri sendiri, lalu anggota keluarga

dan selanjutnya masyarakat luas. Dengan demikian hidup perempuan akan bermakna sepenuhnya dan mendapatkan ridha Allah swt.²⁶

D. Pembinaan Narapidana

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.²⁷ Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingan dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan professional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dengan pancasila, UUD NKRI 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

²⁶Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h. 64.

²⁷C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 42.

Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang:

1. Pembinaan Kepribadian meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan *non formal* diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

d. Pendidikan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari

hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya prilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan social kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan dalam lembaga pemasyarakatan melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya: kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi prabotan rumah tangga).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit industry pembuatan sepatu.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU pemasyarakatan) adalah.²⁸ Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negative sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang

²⁸Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

memiliki potensi yang dapat berkembang kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas social, petugas lembaga pemasyarakatan, rutin, Balai hakim Wasmat dan lain sebagainya.²⁹

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah.

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat
2. Penjatuh pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenakan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

²⁹C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 51.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditujukan bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.³⁰

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana menganal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.³¹

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

³⁰C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 43.

³¹C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 10.

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri, diri sendiri yang akan mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan sebagai tahap:

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap mengetahui diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengetahui diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengetahui potensi diri. Narapidana diajak mampu mengetahui potensi diri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berfikir, bertindak laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang.

- e. Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan Negeranya.
- g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- h. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri juga merupakan sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu.
- i. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran, Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri.³²

Pola pembinaan sebagaimana yang ditempuh ini merupakan suatu penggabungan antara pembinaan intra dan ekstra yang menyangkut:

1. Kepribadian
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara

³²C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 48.

3. Kemampuan intelektual, keterampilan dan kemandirian.

E. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bias narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bias juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.³³

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan digunakan untuk menampung para terdakwa yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara. Dalam sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.

Penjara dulu sebutan orang yang sedang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara

³³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 21 mei 2016. Jam 15.29.WIB.

telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku dari sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya proses pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.³⁴

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan yaitu:

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Peran lembaga pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.³⁵

³⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, h. 79.

³⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

F. *Prespektif Hukum Islam*

1. Istilah dan Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syari'ah al-Islamy*. Kemudian Mardani menjelaskan, bahwa dalam literature hukum dalam Islam maupun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan lafadz hukum Islam. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dan literature barat.

Adapun pengertian hukum Islam dalam makna hukum fiqih Islam, adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syariat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Kemudian menurut Mohd Idris Ramulyo menjelaskan, bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw, dan dikembangkan melalui ijtihad dari para ulama.

Berdasarkan pengertian hukum Islam tersebut di atas, dapatlah dijelaskan, bahwa hukum Islam itu bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasul (Hadis), dan Ijtihad para ulama. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang lebih tinggi bila dibandingkan dari hukum positif lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum agrarian, sebab hukum ini bersumber dari akal budi (rasio) manusia. Sedangkan hukum Islam bersumber dari wahyu Allah Swt. (Al-Qur'an), Hadis, dan Ijtihad.

2. Sumber hukum Islam

Sumber berarti asal sesuatu. Jadi sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam itu banyak. Dari jumlah yang banyak itu ada sebagian yang telah disepakati oleh para ahli *Ushul fiqh*, dan ada juga sebagian yang belum disepakatinya.

Adapun sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ahli *Ushul Fiqh* terdiri atas 4(empat) macam, yaitu:

1. Al-Qur'an,
2. As-Sunnah,
3. Al-Ijma', dan
4. Al-Qias.

Sumber hukum Islam menurut Dede Rosyada ada 3 (tiga), yaitu:

1. Al-Qur'an,
2. Al-Sunnah, dan
3. Ijma' Shahabat.

Kemudian Mohd. Idris Ramulyo mengatakan, bahwa sumber hukum Islam terdiri atas 5 (lima), yaitu:

1. Al-Qur'an,
2. Hadis Rasulullah Saw,
3. Ijtihad (Rayi),
4. Ijma' (Ijmali).

Masing-masing sumber hukum Islam itu dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah masdar yang berarti bacaan atau yang dibaca, berasal dari kata *qara'a* yang artinya ia telah membaca. Pengertian Al-Qur'an menurut Abdul Ghofar Anshori, Yulkarnain Harahab, adalah sebagai berikut:

Kalam Allah diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasulullah Muhammad bin 'abdullah dengan lafadz yang berbahasa arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi *qarbah* sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah bagi mereka yang beriman dengan membacanya.

Berdasarkan pengertian Al-Qur'an tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. Sebagai mu'jizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia yang bertakwa, serta menjadi ibadah bagi yang membacanya.

Al-Qur'an itu terdiri dari 30 (tiga puluh) juz, 114 (seratus empat belas) surah, dan 6236 (enam ribu dua ratus tiga puluh enam) ayat, serta jumlah hurufnya terdiri dari 325.345 (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima). Apabila ditinjau dari segi masa terunnya, maka Al-Qur'an itu terdiri dari ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, atau sesudah Nabi Muhammad saw. Hijrah ke Madinah.

Ayat-ayat Makkiyah meliputi 19/30 dari isi Al-Qur'an terdiri dari 86 (delapan puluh enam) surah dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Ayat-ayatnya pada umumnya pendek-pendek (*Qishar*).

2. Ayat-ayatnya mayoritas mengandung soal keimanan, ancaman, dan pahala, kisah-kisah umat terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti.
3. Ayat-ayatnya dimulai perkataan “yaa Ayyuhannas”.

Ayat-ayat maddaniyah meliputi 11/30 dari isi Al-Qur'an terdiri atas 28 (dua puluh delapan) surah dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Ayat-ayatnya pada umumnya panjang-panjang (*Thiwal*).
2. Ayat-ayatnya mengandung hukum-hukum, baik yang berhubungan dengan hukum adat, atau hukum-hukum dunia, seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, hukum nasional, hukum antar agama.
3. Ayat-ayatnya terdapat perkataan “yaa Ayyuhallazina aamanu”, dan sedikit sekali terdapat perkataan “yaa Ayyuhannas”.

Adapun pokok-pokok isi Al-Qur'an itu ada 5 (lima), yaitu:

1. Tauhid mengesakan Tuhan termasuk di dalamnya semua kepercayaan alam ghaib.
2. Ibadah, sebagai perbuatan yang menghidupkan Tauhid dalam hati dan menerapkannya kedalam jiwa.
3. Janji dan ancaman. Al-Qur'an menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima isi Al-Qur'an dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
4. Jalan-jalan mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Karena itu Al-Qur'an berisi peraturan-peraturan dan hukum-hukum.
5. Riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang yang mau tunduk kepada agama Allah dan mau menjalankan hukum-hukumnya, yaitu para Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan orang-orang yang saleh. Juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumnya. Maksud riwayat dan

cerita-cerita tersebut, ialah untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan.

2. Hadis Rasulullah Saw (Sunnah)

Sunnah pada lughat (bahasa) adalah jalan terpuji, atau jalan/cara yang dibiasakan. Sunnah menurut istilah *Muhadditsin* (ahli-ahli hadis) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Saw. diangkat menjadi Rasul maupun sebelumnya.

Sunnah menurut pendapat (istilah) ahli *ushul fiqh*, ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Saw, baik perkataan, maupun perbuatan, ataupun taqiriri yang mempunyai hubungan dengan hukum. Dasar sunnah (hadis) sebagai sumber hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa (4) ayat 59 dan Surah Hasyr (59) ayat 7.

Adapun bunyi Surah An-Nisa (4) 59, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁶

Apabila hadis itu dilihat dari segi kualitas atau integritas pribadi orang-orang yang meriwayatkannya secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya, sunnah atau hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu

³⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 114.

- a. Hadis Shahih adalah hadis yang bersambung-sambung sanadnya yang dipindahkan (diriwayatkan) oleh orang yang adil dan kokoh ingatan dari yang seumpamanya, tidak terdapat padanya keganjilan dan catatan-catatan yang memburukkannya.
- b. Hadis Hasan adalah hadis yang bersambung-sambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang tidak mempunyai derajat kepercayaan yang sempurna.
- c. Hadis Dhaif adalah hadis yang tidak didapati padanya syarat shahih dan tidak pula didapati padanya syarat hasan. Hadis sahih dan hadis hasan tergolong hadis yang tidak dipergunakan sebagai dalil syara', sedangkan hadis dhaif tidak dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.

3. Ijtihad (Ra'yi)

Sumber hukum Islam yang ke tiga adalah Ijtihad (Ra'yi). Kata ijtihad adalah bahasa arab, di ambil dari kata *ijtihad* yang memiliki arti bersungguh-sungguh, rajin, dan giat. Jadi ijtihad berarti berupaya dengan mencurahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh.

Dengan demikian, ijtihad menurut Imam Syaukani, adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*musyaqqah*).

Senada dengan hal tersebut di atas, dijelaskan juga oleh H. Mohammad Daud Ali yang mengatakan, bahwa: Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis

hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

4. Qias

Qias merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qias menurut dari segi bahasa artinya adalah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Menurut dari segi istilahnya qias adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.

Qias merupakan ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain. Contoh kajian hukum lewat metode qias, seperti larangan meminum *khamar* (sejenis minuman yang memabukkan dibuat dari buah-buahan), melalui qias terhadap minuman bir (minuman keras) dilarang, karena ilat-nya dapat memabukkan; sebab minuman yang memabukkan dari apapun ia dapat dibuat, hukumnya sama dengan *khamar*, yaitu haram (dilarang) diminum. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5), ayat 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁷

Qias itu dapat dikatakan benar apabila memenuhi 4 (empat) rukun, yaitu:

- a. Ashal, yaitu suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh Nash.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 163.

- b. Furu' yakni kejadian baru yang belum diketahui ketentuan hukumnya dan belum terangkat dalam Nash.
- c. Illat, yakni sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum ashal.
- d. Hukum ashal, yakni ketentuan hukum syara' yang telah dinyatakan oleh nash pada ashal dan hendak diletakkan pula pada furu'.

5. Ijma' (Ijmali)

Ijma' merupakan ilmu bahasa adalah mengumpulkan. Ijma' menurut A Rahman I.DoI, adalah kesepakatan pandangan para shabat Nabi Saw, juga kesepakatan yang dicapai dalam berbagai keputusan hukum dan dilakukan oleh para "Mufti" yang ahli, atau para ulama dan fuqaha dalam berbagai persoalan Din al-Islam.

A.Hanafie juga menjelaskan, bahwa ijma', ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada sesuatu masa atas sesuatu hukum syara'. Kemudian Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan, bahwa ijma' adalah kebulatan pendapat fuqaha mujahidin di antara umat Islam pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad Saw.

Berdasarkan pengertian ijma' tersebut di atas dapat diketahui, bahwa ijma' merupakan suatu kesatuan pendapat dari ahli fiqih Islam pada satu masalah dalam satu masalah dan wilayah tertentu serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Musyawahar yang sehat disertai dengan penggunaan nalar hukum, ijtihad, adalah langkah-langkah awal untuk mencapai kebulatan pendapat, ijma' al-Khulafa' al-Rasyidin selalu bermusyawahar dengan para sahabat setiap kali muncul masalah baru dan memerlukan keputusan. Kebijakan Khalifa Abu Bakar, umpamanya bias dijalankan dan didasarkan pada posisi ijma' para sahabat.

Ijma' itu dapat dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Ijma' Bayani;
- b. Ijma' Sukuti

Ijma' bayari oleh Ahmad Hanafi disebutnya dengan Ijma' qauli, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid, dan Ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya, akan tetapi mereka tidak mengeluarkan persetujuan atau bantahannya.

Jika sudah terjadi Ijma', maka ijma' itu menjadi hujjah yang qat'i. ijma' merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentative di bawah Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat menjadi pedoman yang dapat menggali hukum-hukum syar'i.

Selain sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ahli Ushul Fiqh, (al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qias), ada juga sumber hukum yang belum disepakati oleh jumhur ahli Fiqh, yaitu ada 6 (enam), yaitu:

1. Al-Istihsan

Istihsan merupakan salah satu sumber hukum yang dipermasalahkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya, para ulama menggunakan *istihsan* menurut H. Amir Syarifuddin dalam arti *lughawi* (bahasa), yaitu "berbuat sesuatu yang baik". Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan "*istihsan*" itu.

Menurut Ahmad Hanafi, bahwa istihsan adalah memindahkan hukum sesuatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian tersebut.

Istihsan menurut Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, adalah meninggalkan qias yang nyata untuk menjalankan qias yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum Kulli untuk menjalankan hukum *istisna'I* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.

Contoh *istihsan* misalnya seorang wanita auratnya mulai dari ujung rambut sampai dengan kaki. Namun demikian boleh dilihat sebagai anggota badan wanita tertentu, karena ada keperluan, seperti untuk kepentingan pemeriksaan seorang dokter kepada pasiennya. Jadi disini terdapat pertentangan kaidah, bahwa tubuh wanita adalah aurat, tetapi boleh dilihat, karena ada pengobatan. Dengan demikian digunakan illat "*at-taysir*" (memudahkan).

2. Al-Mashlahah-mursalah

Mashlahah mursalah adalah maslahat yang bersesuai dengan tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.

Contohnya mensyaratkan adanya surat nikah, untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, dan nafkah. Mencetak mata uang untuk pertukaran secara resmi dari suatu negara, mengadakan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

3. Al-Istishhab

Istishhab dalam pengertian logawi adalah "selalu menemani" atau "selalu menyertai". Menurut *ushul fiqih*, bahwa istishhab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut.

Contohnya dengan minuman anggur yang memabukkan yang haram berdasarkan syara'. Namun jika kemudian minuman anggur itu berubah wujud sehingga unsur yang memabukkan itu hilang, misalnya menjadi cuka, maka hilang pulalah keharamannya.

4. Al-Urf

Istilah kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*'. Kata ini sering diartikan dengan '*al-ma'ruf*', dengan arti "sesuatu yang dikenal" jadi '*urf*' adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut ahli fiqih, bahwa '*urf*' merupakan sumber hukum, apabila tidak ditemukan nash. Dalam hal ini muncullah kaidah sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang bagus menurut '*urf*', sama dengan makruf menurut syara'.
- b. Sesuatu yang disyaratkan '*urf*', sama dengan istilah syara'.
- c. Sesuatu yang dipandang tetap menurut '*urf*', sama ketetapan nas.

Apabila '*urf*' itu bertentangan dengan syara', maka tidak bias menjadi sumber hukum. Contoh '*urf*', seperti kebiasaan dalam perbuatan jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata ijab qabul.

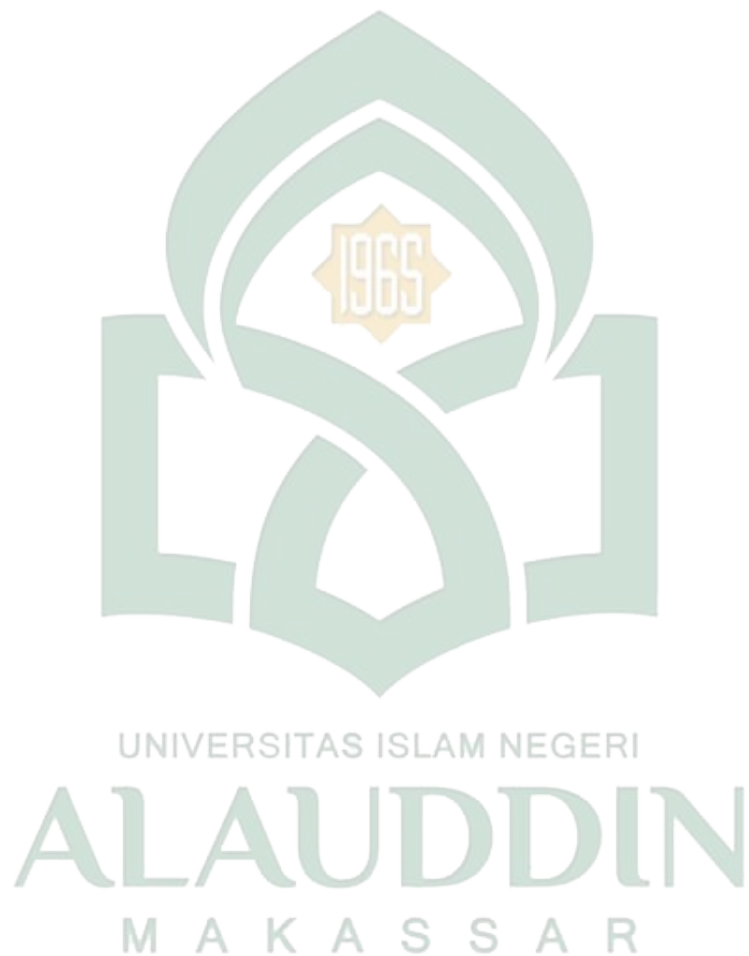
5. Madzahib-shahabi

Mudzahib-Shahabi atau dengan istilah qaulu shahabi adalah pendapat para sahabat yang telah beriman kepada Nabisebelum Hudaibiyah, turut berperang bersana Nabi atau terkenal karena fatwanya.

Mazhab Shahabi (qaulu shababi) tidak menjadi hujjah atas sahabat lainnya. Hal ini sudah disepakati. Yang masih diperselisihkan, adalah apakah pendapat sahabat bias menjadi atas tabiin dan orang-orang yang sesudah mereka. Dalam hal ini menurut A. Hanafie ada 3 (tiga) pendapat yaitu:

- a. Pendapat sahabat tidak menjadi hujjah sama sekali. Demikianlah pendapat Jumhur. Perkataan seseorang mujtahid bukanlah suatu dalil yang dapat berdiri sendiri.

- b. Pendapat sahabat menjadi hujjah dan didahulukan daripada qias. Demikianlah pendapat Malik, golongan Hanafiah dan Syafi'i. Bahkan Ahmad bin Hambal mendahulukan pendapat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Ditinjau dari perspektif penelitian hukum, penelitian ini selain berjenis penelitian hukum empiris, juga mengakomodasi penelitian hukum normative. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong *Field Research* Kuantitatif. Sedangkan secara metodik, penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Louise Kiddler mengemukakan bahwa penelitian evaluatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena dari sebuah produk, program atau kebijakan yang menekankan pada efektifitas pada produk, program atau kebijakan tersebut.¹

Sedangkan menurut tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat komparasi dan atau asosiasi dengan variable lainnya.² Adapun lokasi penelitian berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut hukum.

Meskipun denotasi kata yuridis lebih mengacu pada hukum nasional, akan tetapi pendekatan yang penulis maksudkan termasuk pula kata yuridis yang berkonotasi

¹Louise Kiddler, "*Researse Methods in Social Relation*", dalam sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet XXI; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 10.

²Louise Kiddler, "*Researse Methods in Social Relation*", dalam sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet XXI; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 11.

C. *Sumber Data*

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kuantitatif yang terdiri atas:

1. Data Primer

Berupa data yang didapatkan secara langsung yang terdiri atas: hasil-hasil wawancara, dokumentasi dan observasi empiris.

2. Data Sekunder

Berupa berbagai referensi yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Referensi yang dimaksud berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber hukum tertulis (nasional maupun islam), *database software* dan artikel (*online* maupun *offline*).

D. *Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Berupa pengamatan terstruktur secara cermat guna memperoleh data primer penelitian. Observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, dan dimana tempatnya.

2. Wawancara

Berupa proses tatap muka dalam rangka *interview* dengan informasi guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.³

³Suryono, Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuhamedika, 2010), h. 61.

3. Dokumentasi

Berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi bukti dan keterangan (gambar, kutipan, dan bahan referensi lain) sebagai data yang mendukung penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Kuesioner observasi

Merupakan kuesioner yang digunakan dalam proses observasi. Pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peneliti berdasarkan hasil observasi di lapangan.

2. Kuesioner wawancara

Merupakan kuesioner yang digunakan dalam wawancara tatap muka dengan informan. Pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh pewawancara berdasarkan jawaban responden pada saat wawancara.

3. Kamera

4. Alat tulis menulis

5. Alat rekam

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif. Selain itu, digunakan juga pengolahan data secara deduktif, induktif dan korporatif.

G. Penguji Keabsahan Data

Penguji keabsahan data atau dengan kata lain validasi penelitian ini dengan cara Trianggulasi. Trianggulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik

pengumpulan data, dan waktu. Lebih spesifik lagi jenis metode triangulasi yang penulisan gunakan adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah metode validasi kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi dan atau kuesioner.⁴



⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 372.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran umum Lokasi Penelitian*

1. Deskripsi Fisik

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.¹

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.²

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang,

¹Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2010* (Gowa: BAPPEDA, 2013), h. 1.

²Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2010*, h. 1.

Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.³

2. Deskripsi Antropologis

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2013 tercatat sebanyak 670.465 jiwa yang terdiri dari 329.673 jiwa atau 49,17% penduduk laki-laki, dan 340.792 jiwa atau 50,83% penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 97, ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,71%, sedangkan penduduk usia produktif

³Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2010*, h. 1.

mencapai 60,29% dan penduduk usia lanjut terdapat 7,99% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,68% pertahun.⁴

3. Letak lokasi penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Lembaga – Bollangi Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yang menempati lahan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dengan Luas Bangunan secara keseluruhan $\pm 14.000 \text{ M}^2$.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa mulai dibangun pada Tahun 2004 dan mulai dioperasikan sejak 5 September 2007 serta diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 oleh Bapak Patrialis Akbar, S.H., Menteri Hukum dan HAM R.I.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan khusus wanita yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan perawatan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan wanita

4. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa

JURNAL HARIAN

HARI: KAMIS

TANGGAL: 4 AGUSTUS 2016

REG	TAHANAN				URAIAN	UMUR	PASAL
	P	M	K	S			
AI	-			-			

⁴Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2013*, h. 151.

AII	-			-			
AIII	25			25			
AIV	-			-			
AV	1			1			
JML	26			26			
REG	NARAPIDANA				URAIAN	UMUR	PASAL
	P	M	K	S			
BI	154		8	146			
BIIA	12			12			
BIIB	-			-			
BIII	5			5			
JML	171		8	163			
BAYI	5		1	4			
TOTAL	202		9	193			

KETERANGAN :

AI : Tahanan Polisi

AII : Tahanan Kejaksaan

AIII : Tahanan Pengadilan Negeri

AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi

AV : Tahanan Mahamah Agung

BI : Narapidana yang masa tahanannya di atas 1 tahun

BIIA : Masa pidana di atas 3 bulan sampai 1 tahun

BIIB : Masa pidana 0-3 bulan

BIII : Sedang menjalani subsidair (Pidana Pengganti Kurungan)⁵

5. Tugas–Tugas Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa

1) Tugas – tugas Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan antara lain :

- a. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Rohani. Bagi Narapidana/Tahanan yang beragama Islam Setiap hari Jum'at Pagi Musholla An-Nisa Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa melaksanakan Pengajian oleh Ustaz / kiyai dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Serta menerima pelajaran Belajar Al-Quran. Sedangkan bagi Umat Kristen setiap hari Sabtu dan Minggu dilaksanakan kebaktian di gereja Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa dipimpin oleh Persatuan Pendeta / Gereja sekotamadya Makassar.
- b. Olah Raga kesegaran jasmani oleh Karyawan dan Karyawati Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa bersama Narapidana setiap Hari Jum'at.
- c. Melaksanakan Program belajar membaca bagi Narapidana/Tahanan yang buta huruf.
- d. Melakukan program hafal Asmaul Husna bagi yang Muslim dan Hafal Al-Kitab bagi yang beragama Kristen.
- e. Peningkatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang bebas dan Pelepasan Bersyarat.
- f. Mengkoordinir para Korvei Ruangan.
- g. Mengkoordinir para Tanping Koki untuk mempersiapkan Sarapan, Makan Siang dan Makan Malam Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa. *Laporan Harian. Tanggal 4 Agustus 2016.*

h. Pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA

Sungguminasa dilaksanakan oleh :

- 1 (satu) orang dokter .
- 1 (satu) orang perawat.
- 1 (satu) orang bidan.
- Serta Tamping Klinik 1 (satu) orang.

2) Tugas – tugas Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Klas IIA Sungguminasa antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan / penjagaan dan perawatan terhadap Narapidana.
- b. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan pengawalan Narapidana.
- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Narapidana yang melanggar tata tertib.
- e. Membuat catatan harian dan berita acara umum situasi keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa

Dalam menguraikan pembinaan Narapidana wanita maka terlebih dahulu dikemukakan gambaran umum keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa berjumlah sebanyak 60 Orang tetapi yang mempunyai wewenang khusus untuk membina hanya berjumlah 4 orang dengan warga binaan berjumlah 189 orang yang terdiri dari Narapidana 163 orang dan Tahanan 26 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut

**KLASIFIKASI NARAPIDANA WANITA KELAS IIA KABUPATEN
GOWA**

NO	Jenis Kasus	Jumlah
1	Narkotika	121 orang
2	Pembunuhan	12 orang

3	Pencurian	16 orang
4	Penggelapan	14 orang
5	Penipuan	16 orang
6	Tipikor	4 orang
7	Perlindungan Anak	3 orang
8	Pemalsuan surat-surat	2 orang
9	Trafficking	1 orang
JML		189 Orang

Sumber: Data Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Wanita KALAS IIA Kab. Gowa Tahun 2016

Berdasarkan keadaan Narapidana wanita sebagaimana di uraikan pada data di atas dari segi jumlahnya hampir memenuhi kapasitas penghuni yang hanya dapat menampung maksimal 268 orang. Oleh karena itu, pembinaan khusus bagi Narapidana wanita merupakan upaya yang harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan agar niat dan motif bagi wanita untuk melakukan tindak pidana dapat terkendali.

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang

Ketika menjalankan suatu aturan tidak lepas dari landasan atau yang dijadikan sebagai dasar aturan, begitu juga dengan pembinaan Narapidana wanita di Kabupaten Gowa. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pembinaan narapidana wanita di Lapas Wanita Kabupaten Gowa berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini terdapat dalam Bab II Pasal 5 yang berbunyi: “ sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman:
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan:
- 3) Pendidikan:
- 4) Pembimbingan:
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia:
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan: dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu⁶

Asas-asas tersebut menjadi dasar pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, secara otomatis asas ini juga dianut oleh lembaga Pemasyarakatan Wanita di Kabupaten Gowa. Sedangkan, yang terdapat dalam pasal 6 dalam Bab II :

- a) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- b) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana di atur lebih lanjut dalam BAB III
- c) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - (1) Terpidana bersyarat:
 - (2) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas:
 - (3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial:
 - (4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial:

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, BAB II Pasal V.

- (5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Gowa sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi Narapidana Wanita merupakan wadah untuk menampung Narapidana dan tahanan wanita untuk dididik dan dibina berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan kebijaksanaan pemasyarakatan yang di simbolkan dalam bentuk pohon beringin “PENGAYOMAN” berbagai kebijakan pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan, tanpa terkecuali. Adapun hak-hak tersebut antara lain:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, BAB II Pasal VI.

- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Yohana Widayati adapun hafalan yang wajib dihafal oleh seluruh Narapidana seperti Pancasila, catur dharma warga binaan, dan apabila warga binaan bisa lebih cepat menghafal dan mengikuti kegiatan serta tidak melanggar tata tertib, maka pengurusan mereka akan lebih cepat di proses dan mereka bisa di rekomendasikan dalam pembebasan bersyarat. Dan apabila ada yang tidak bisa atau belum bisa menghafal maka pengurusannya akan di pending sampai Narapidana tersebut bisa menghafal dan menaati semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Gowa.

Adapun larangan yaitu memegang handphone, merokok, mengedarkan uang apabila kedatangan maka dibuatkan berita acara maka untuk pengurusan pembebasan bersyarat bisa ditunda. Adapun remisi diberikan 2 kali setahun yaitu pada saat 17 Agustus dan saat hari raya lebaran, bagi yang nasrani hari raya natal. Remisi diberikan minimal 15 hari maksimal 6 bulan apabila tidak ada pelanggaran.⁸ Disamping itu, Annisya Ikhsyania selaku Kasubsi Bimaswat mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana wanita tidak dibedakan baik bagi Narapidana jangka panjang

⁸ Yohana Widayati, Kepala Seksi Binadik, wawancara, Gowa, 21 juli 2016.

maupun Narapidana jangka pendek. Dalam pengertian tersebut bahwa tidak di dasarkan atas jenis kejahatannya, umur maupun lamanya hukuman.⁹

Adapun bentuk-bentuk kegiatan sebagai pelaksanaan pembinaan Narapidana wanita, lebih berorientasi pada keterampilan dan pembinaan kerohanian. Berdasarkan data penelitian data dokumen yang terhimpun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Gowa, kegiatan yang bersifat keterampilan sesuai kodrat wanita dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Keterampilan Penjahitan baik berupa Gantungan Tas, Sendal Kain, Baju-Baju, Sarung Bantal, Gorden, Tutup Gelas dari Kain, Tempat Tisu, dan Lain-lain.
- b. Kegiatan Tata Boga yaitu praktek membuat kue-kue yang pada hari besukan yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dijual kepada pembesuk.
- c. Kegiatan Salon, disini WBP dapat melakukan pemotongan rambut, facial, lulur. Selain diperuntukan bagi WBP kegiatan ini juga untuk pegawai. Pada salon ini juga disediakan kebutuhan untuk WBP seperti, bedak, kapas, pembersih muka, dan lain-lain.
- d. Kerajinan Tangan yang diberikan kepada WBP antara lain : Membuat Bingkai dari Kertas Koran, Membentuk Bunga-Bungan Pohon dari Kerak telur, Membuat Boneka gantungan Kunci, dan lain-lain.
- e. Kegiatan berkebun seperti menanam sayur-mayur dan buah-buahan

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, alhamdulillah diperoleh hasil, selain bisa memberikan insentif untuk WBP juga untuk menambah kesejahteraan pegawai pada saat Hari Raya Idul Fitri. Adapun hasil dari penjualan sebagian dimasukkan kedalam Kas Lembaga dan sebagian diberikan kepada Narapidan.

⁹ Annisya Ikhsyania, Kasubi Bimaswat, *wawancara*, Gowa, 21 Juli 2016.

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pelatihan yang terbagi dalam 5 program :

a. Penjahitan	=	9 Orang.
b. Pertanian	=	25 Orang.
c. Tata Boga	=	3 Orang
d. Salon	=	2 Orang
e. Kerajinan Tangan	=	<u>17 Orang.</u>
JUMLAH	=	56 Orang

C. Pembinaan Narapidana Wanita Menurut Hukum Islam

Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap umatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan Narapidana, di harapkan Narapidana itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak para narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Kab. Gowa mengulangi perbuatan kejahatan, baik terhadap perbuatan kejahatan yang sama maupun terhadap perbuatan kejahatan yang berbeda.

Adapun tujuan dilaksanakan pembinaan narapidana dalam Islam yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana. Di dalam Islam sangat tegas di atur bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan di hukum seperti dalam kasus pencurian si pelaku akan di potong tangannya. Namun di negara Indonesia belum menerapkan hukum Islam tapi sistem yang di terapkan yaitu melakukan pembinaan secara agama melalui lembaga pemasyarakatan agar Narapidana saat

bebas nanti tidak melakukan kejahatan lagi. Selain itu, ada beberapa hal sebagai tujuan dilakukannya pembinaan Narapidana yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)
4. Memelihara Keturunan (*hifzh al-Nasl*)
5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Bentuk Pembinaan Narapidana Wanita di Kabupaten Gowa menurut Ibu Yohana Widayati, Kepala Seksi Binadik dalam hal rutinitas keagamaan yaitu pembinaan seperti Jum'at ibadah, ceramah, rutinitas mengaji setiap hari setelah melaksanakan shalat lima waktu, membaca Iqra, dan kegiatan rutin setiap hari sabtu yaitu melantunkan Tilawah, yang bekerja sama dengan pihak luar, sedangkan hari senin rabu ada ceramah rutin dari pihak luar, adapun tugas wajib Narapidana khususnya yang beragama Islam yaitu menghafal asmaul husna, bacaan shalat, surat-surat pendek, disini mereka diajarkan baca tulis Al-Qur'an, mempelajari huruf Hijaiyah.

Sementara menurut Ibu Annisya Ikhsyania, Kasubsi Bimaswat, menjelaskan bahwa pembinaan Narapidana wanita yaitu terdapat 3 (tiga) unsur yaitu Kemandirian, Kepribadian dan Kerohanian

Adapun pembinaan kepribadian menurut beliau yaitu kemampuan berwawasan nusa dan bangsa dan pembinaan mental. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kemandirian itu memiliki keahlian serta melakukan kegiatan kerja agar supaya ketika Narapidana telah selesai menjalankan masa tahanannya mampu mandiri dan dalam pembinaan kerohanian yaitu melaksanakan shalat lima waktu, mengaji setelah melaksanakan shalat, melakukan pengajian bersama pada

hari tertentu dan menghafal asmaul husna, surat-surat pendek, baca tulis Al-Qur'an sehingga mereka bisa memahami agama secara mendalam.¹⁰

Sementara menurut harmia Abdullah salahsatu Narapidana menuturkan bahwa pembinaan yang ia jalani yaitu melaksanakan praktek tataboga, praktek keterampilan seperti menjahit, membuat souvenir, berkebun.¹¹

D. Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana Wanita Kelas IIA Sungguminasa

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat dikembangkan potensinya kearah yang positif sebagai sarana merubah seseorang menjadi manusia produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pembedaan. Pemberian kegiatan untuk pengembangan keterampilan bagi warga binaan, melalui petugas lembaga pemasyarakatan diharapkan agar kelak kembali ketengah-tengah masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Demikian pula agar pembinaan ini dapat memberikan motivasi bagi hasil perubahan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan yang mulia ini, belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala yang dialami. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas Kab. Gowa, hasil wawancara Yohana Widayati menjelaskan bahwa:

Rendahnya minat dan kepedulian dari lembaga atau perusahaan untuk berperan serta dalam memberikan binaan kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena tugas-tugas di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat memberikan kontribusi secara timbal balik, dan tidak dapat

¹⁰ Annisya Ikhsyania, Kasubi Bimaswat, *wawancara*, Gowa, 21 juli 2016.

¹¹ Harmia Abdullah, Narapidana, *wawancara*, Gowa, 21 juli 2016.

menumbuhkan rasa kebanggaan. Hal ini disebabkan, masalah dukungan pendanaan dalam pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan sendiri atau dapat bekerja pada pihak lain sesuai keterampilan yang dimiliki.

Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Kab. Gowa, memiliki jumlah warga binaan sebanyak 193 orang dan kapasitas Lembaga hanya dapat menampung maksimal 268 orang, sementara fasilitas yang tersedia adalah:

- a. Blok hunian sebanyak 22 kamar
- b. Kamar pengasingan sebanyak 6 kamar
- c. Ruang klinik 1 kamar
- d. Ruang rawat inap 1 kamar
- e. Aula 1 buah
- f. Masjid
- g. Gereja
- h. Bengkel kerja Narapidana
- i. Lapangan olahraga
- j. Perpustakaan.

Sistem Pemasyarakatan sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan, sebagai paradigma fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan menjadi tempat untuk melakukan pembinaan.

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam upaya memberikan pembinaan bagi warga binaan sebagaimana hasil wawancara Annisya Ikhsyania adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya over kapasitas penghuni Lapas sehingga pembinaan tidak berjalan secara optimal.

2. Sebagian warga binaan tidak memiliki keluarga yang jelas, sehingga tidak ada pihak dari keluarga yang ikut memberikan support dengan melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga berdampak tidak adanya jaminan keluarga yang harus diketahui oleh Lurah di Wilayah tempat tinggal Narapidana. Dalam uraian di atas, maka potensi untuk melakukan pelanggaran hukum setelah kembali ke masyarakat dapat terjadi secara berulang akibat tidak adanya wadah keluarga yang menampung dan memberikan dukungan kepada mereka.
3. Masih kurangnya personil pengamanan pada Lapas Wanita Kelas IIA Kab. Gowa, karena jumlah petugas di Lapas hanya 60 orang, sementara yang mempunyai kewenangan di bagian pembinaan hanya 4 orang, kiranya dapat dipertimbangkan untuk penambahan personil.
4. Kurangnya perhatian fasilitas lembaga pada Lapas Wanita Kelas IIA Kab. Gowa, seperti komputer, alat pengamanan & kesehatan. Hal ini dapat menghambat kinerja sehari-hari pada Lapas Wanita Kelas IIA Kab. Gowa.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia seperti tenaga bantuan guru, tenaga pelatih untuk kegiatan kegiatan juga faktor jarak tempuh yang jauh di pelosok. Pemerintah hanya berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan yang berada di kota dibanding di daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam, maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sudah berjalan ketentuan dan prosedur yang ada baik dari aspek sosial, kerohanian, keamanan, ketertiban dan pelatihan keterampilan.
2. Pembinaan narapidana menurut hukum Islam dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa dilaksanakan dengan tertib bagi yang beragama Islam melakukan jumat ibadah berisi kegiatan ceramah dan shalat berjamaah oleh Ustadzah dan melakukan program hafal asmaul husna.
3. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa yaitu kendala teknis seperti kurangnya kelengkapan yang menunjang fasilitas kerja kantor dan narapidana seperti peralatan komputer, alat pengamanan, alat kesehatan. Serta kurangnya jumlah petugas serta pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Gowa. Serta kurangnya perhatian pemerintah untuk memberikan jaminan kepada calon mitra untuk

mengambil peran dalam pembekalan keterampilan bagi Narapidana, agar kelak menjadi modal menciptakan lapangan kerja sendiri setelah selesai menjalani pembedaannya.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Hendaknya pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pembinaan Narapidana melalui upaya-upaya preventif termasuk mengadakan program-program pembinaan yang bersifat keterampilan (Skill) sehingga dapat menciptakan pekerjaan sendiri. Di samping itu, perlu di jalin kerjasama berbagai pihak yang memiliki bidang kegiatan yang di butuhkan dalam pembinaan Narapidana wanita di sesuaikan tingkat pendidikan Narapidana wanita. Hal ini penting agar setelah menjalani pembedaan kembali di tengah-tengah masyarakat tidak lagi ada niat untuk mengulangi perbuatannya.
2. Perlunya memperbaiki sistem pembinaan yang tidak hanya dari segi pengembangan kreativitas saja, akan tetapi perlu pula penyediaan program bimbingan dan konseling, sehingga Narapidana ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya memiliki bekal cukup untuk memulai kembali kehidupannya yang baru.
3. Hendaknya pemerintah lebih memberikan perhatian kepada Lembaga Pemasyarakatan yang berada di pelosok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Harmia. Narapidana. Wawancara, Gowa, 21 juli 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2010*. Gowa: BAPPEDA, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*. Cet I; T.TP: Amzah, 2002.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- Hamid, Atiqah *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: DIVA pers, 2016.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hmibecak.blogspot.co.id diakses pada tanggal 28 juni 2016. Jam 22.55 WIB
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>. Diakses pada tanggal 03 April 2016. Jam 20.30. WIB.
- Ikhsyania, Annisya. Kasubsi Bimaswat. Wawancara, Gowa, 21 juli 2016.
- Irianto, Sulistyowati dan L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al- Qur'an Terjemah Tafsiriyah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Kiddler. Louise. "Researse Methods in Social Relation", dalam sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Cet XXI; Bandung: Alfabeta, 2005.
- Kurniati. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2011.

- LapasWanitaSungguminasa“Profil”,*WebsiteResmi.Lapaswanitasungguminasa.blogspot.co.id/p/profil_22.html?m=1* (14 Mei 2016).
- Lumintang, P. A. F. *Hukum Panintesisir Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Markarma, A. “Bias Gender Dalam Penafsiran Al-qur’an”, Tesis. Makassar: Program Pascasarjana universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2003.
- Munajat, Makhrus. *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Yogyakarta, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Megawati Institute: CV. Bisma Optima, 2014.
- Priyatno, Dwijaya. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan*, BAB I, Pasal I Ayat VII.
- R, Abd Rahman. *Perempuan Antara Idealis Dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan*. Bandung: PT Revika Aditama, 2008.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soetrisno, Loekman. *Kemiskinan, Perempuan, Dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: kanisius, 1997.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Suryono, Mekar Dwi Anggraeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhamedika, 2010.
- Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan.
- Widayati, Yohana. Kepala Seksi Binadik. *Wawancara*, Gowa, 21 Juli 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Samata, 18 April 2016

Nomor : SI.2/PP.00.9/1440 /2016
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi
An. Sdr (i). Fidyastuti

Kepada YTH.

1. DR. Dudung Abdullah, M. Ag (Pembimbing I)
2. Dr. Hamzah Hasan, M. Hi (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 26 April 2016

Waktu : 13.00 wita

Tempat : Ruang Yustisi Lt. 4 Fak. Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Perspektif Hukum Islam

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Jurusan,

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddn Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 1440 Tahun 2016
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2016

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
2. Dr. Hamzah Hasan, M. Hi
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Fidyastuti
NIM : 10300112064
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Perspektif Hukum Islam
 - b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
 - d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 18 April 2016
Dekan,

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **FIDYASTUTI, NIM: 10300112064**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa dalam Perspektif Hukum Islam*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata, 25 Agustus 2016 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dudung Abdullah, M. Ag


NIP. 19540203 198503 1 002


Dr. Hamzah Hasan, M. Hi

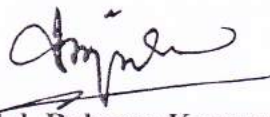
NIP. 19631231 199302 1 003

Penguji I

Penguji II


Dra. Nila Sastrawati, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002


Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D

NIP. 19731231 200501 1 034

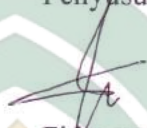
PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HPK/2016

Judul Skripsi: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di LAPAS Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam

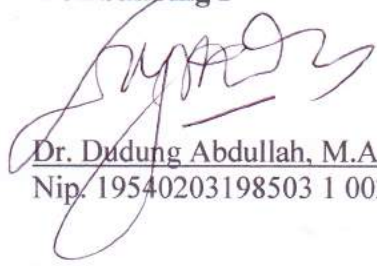
Samata, 18 Mei 2016

Penyusun,



Fidyastuti

Nim. 10300112064

Pembimbing I

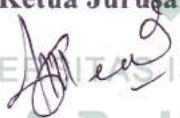

Dr. Dudung Abdullah, M.Ag
Nip. 19540203198503 1 002

Pembimbing II


Dr. Hamsah Hasan, M.Hi
Nip. 19631231199302 1 003



Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan HPK


Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Nip. 197107121997032002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Nip. 19621016 199003 1 003

Nomor : SI.1/PP.00.9/1928/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 15 Agustus 2016

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. Kurniati, M.Hi (Sekertaris)
 3. Dra. Nila Satrawati, M.Si (Penguji I)
 4. Dr. Abdul Rahman Kanang, M.Pd (Penguji II)
 5. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag (Pembimbing I)
 6. Dr. Hamzah, Hasan, M.Hi (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Fidyastuti

NIM : 10300112064

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016

Waktu : Pukul 13.00 – 14.00

Tempat : Ruang LT

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 28 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Fidyastuti
N I M : 10300112064
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS Kab. Gowa dalam Perspektif Hukum Islam"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.Hi
Penguji I : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji II : Dr. Abd. Rahman Kanang, M.Pd
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Darmawati Samma, SE

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 36 / Tahun 2016

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Memeriksa** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi H P K tanggal 8 Agustus 2016 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JRAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

: Samata
: 8 Agustus 2016

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI				PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH 03	MKDU/DIS 04	MKKP 05	06	
1	Fidyastuti 10300112064	Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, M.A	Dr. Sohra, M.Ag	Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Hj. Suriani, S.Sos, M.M Nurhayati Wahid	
2	Yusrifar 10300112097	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Dr. Muh. Sabir, M.Ag	Dr. Hazah Hasan, M.Hi	Dr. Hamsir, M.Hum Dra. Andi Masniah Nurjannah	
3	Muh. Hamka Sahrir 10300112089	Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag	Dr. Hamsir, M.Hum	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Dra. Hj. Suharti, M.Pd Musyifikah Ilayas, S.Hi, M.Hi	
4	Aksanul Khalisin 10300112062	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Dr. Alimuddin, M.Ag	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, SH Darmawati Samma, SE	





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : SI.1/PP.00.9/1423/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 30 Agustus 2016

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. Hamsir, M.Hum (Sekertaris)
 3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Penguji I)
 4. Abd. Rahman, M.Pd, Ph.D (Penguji II)
 5. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag (Pembimbing I)
 6. Dr. Hamzah Hasan, M.Hi (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Fidyastuti
NIM : 10300112064
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Buka Sidang : 08.30.00 WITA
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah
Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam

Dekan, ✓

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 454 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Fidyastuti
N I M : 10300112064
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Prihal : Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa dalam Perspektif Hukum Islam"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum
Penguji I : Dra. Nila Satrawati, M.Si
Penguji II : Abd. Rahman, M.Pd, Ph.D
Pelaksana : 1. Hj. Suriani, S.Sos, M.M
2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Samata
: 30 Agustus 2016

Nomor : SI.1/PP.00.9/48/2016

Samata, 2 Mei 2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada

Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel.

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Fidyastuti
Nim	: 10300112064
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HPK
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTP Blok AB No. 35, Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan
Kab. Gowa dalam Perspektif Hukum Islam**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
2. Dr. Hamsah Hasan, M. Hi

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 s/d 9 Juli 2016

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata, 2 Mei 2016

An Rektor
Dekan Fakultas Syariah & Hukum





1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 5 5 0 8

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 5370/S.01.P/P2T/05/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM
Provinsi Sulawesi Selatan

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari Nomor : SI.1/PP.00.9/1458/2016 tanggal 02 Mei 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : FIDYASTUTI
Nomor Pokok : 10300112064
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KAB. GOWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 Mei s/d 09 Juli 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 Mei 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal



Nomor : W.23.UM.01.01-190
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

10 Mei 2016

Yth. Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa
di - Sungguminasa

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5370/S.01.P/P2T/05/2016 tanggal 09 Mei 2016 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : FIDYASTUTI
Nomor Pokok : 10300112064
Program Studi : HPK
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat : Jln. Muh. Yasin Limpo No.36 Samata, Sungguminasa Gowa

Bermaksud untuk mengadakan penelitian di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa untuk menyusun **Skripsi** dengan judul " **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KAB.GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ", yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2016 s/d 10 Juli 2016, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimah kasih

An. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi
u.b. Kepala Bagian Umum



Ismail Pabitte, SE, MH
NIP. 19601001 199103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan)
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WANITA SUNGGUMINASA
JL. Lembaga – Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa 92172
E-Mail : lapaswanita@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.23.PAS36.UM.01.01 - 413

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Sungguminasa, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fidyastuti
Nomor Pokok : 10300112064
Program Studi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Muh. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa

telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Sungguminasa dari tanggal 10 Mei 2016 s/d 10 Juli 2016 untuk menyusun Skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KAB. GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 10 Juli 2016
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Wanita Sungguminasa,

Rafni Trikoriaty Irianta
NIP. 19621022 198703 2001



RIWAYAT HIDUP



FIDYASTUTI, Lahir di Jayapura, pada tanggal 16 desember 1994 dari pasangan suami istri **Abdul Hamid Dhariza** dan **Sitti Jastiya** yang merupakan anak ke dua dari empat bersaudara.

Penulis memulai pendidikan pada taman kanak-kanak TUNAS HARAPAN pada Tahun 1999 di Kec. Skanto Kab. Jayapura dan tamat pada tahun 2000. Kemudian pada tahun yang sama langsung melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah dasar di MIN. MODEL JAIFURI dan tamat pada Tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 2 SKANTO hingga tahun 2008 lalu pindah ke SMPN 1 JAYAPURA dan tamat pada tahun 2009. Selanjutnya masuk di SMA NEGRI 2 JAYAPURA lalu pada tahun 2011 pindah ke SMA NEGRI 2 SKANTO dan lulus pada Tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar(UIN). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah swt bisa menimba ilmu yang merupakan bekal di masa depan. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah di peroleh dengan baik, dan dapat membahagiakan orangtua yang sudah mendoakan dan mendukung serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.